



Universitas
Harkat Negeri

MODUL PEMBELAJARAN: PANCASILA

SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

PERTEMUAN KE : 1

POKOK BAHASAN : LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sejatinya telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Nilai-nilai luhur tersebut telah tertanam pada pribadi masyarakat Bangsa Indonesia pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah ditemukannya beberapa bangunan seperti candi, relief, sarkofagus, punden berundak, dan lain-lain sebagai wujud bahwa nenek moyang kita sudah mengenal adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bukti-bukti yang lain adalah adanya sistem gotong royong dan musyawarah mufakat, serta toleransi. Seloka persatuan "Bhineka Tunggal Ika" yang terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit juga merupakan bukti nilai-nilai luhur nenek moyang kita yang kemudian dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia.

Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat diibaratkan dengan sebuah bangunan, tempat bernaungnya para penghuninya, yakni rakyat Indonesia. Agar bangunan tersebut kokoh dan kuat, memerlukan dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Sama halnya dengan suatu negara, agar suatu negara itu dapat menjadi kuat dan kokoh, haruslah memiliki dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara. Cita-cita dan tujuan ddirikannya suatu negara akan dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Cita-cita dan tujuan tersebut tercermin dalam Pancasila.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya.
2. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya.
3. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

C. MATERI

1. Landasan Pendidikan Pancasila
2. Penegrtian Pancasila

D. RANGKUMAN

Latar Belakang Pendidikan Pancasila, meliputi:

1. Latar Belakang Historis

Bukti-bukti atau fenomena historis yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan dijadikan sebagai Dasar negara dapat dilihat dari bukti-bkti, peristiwa, ungkapan-ungkapan atau pernyataan seperti berikut.

- a. Pada pembukaan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua mengemukakan dasar Indonesia Merdeka.

- b. Pidato Prof. Moh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.
- c. Pidato Prof. Soepomo pada 31 Mei 1945
- d. Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang mana di dalamnya muncul istilah Pancasila.

2. Latar Belakang Kultural

Untuk memahami landasan kultural Pendidikan Pancasila tersebut, dapat dilihat dari asal muasal unsur-unsur Pancasila tersebut. Secara kultural unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat-istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan, antara lain:

a. Pada sila Ketuhanan YME

Ditemukannya tempat-tempat ibadah seperti candi, sarkofagus, punden perundak-undak, serta beberapa kitab suci merupakan wujud daripada nenek moyang kita mengenal adanya kepercayaan.

b. Pada sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Sejak dulu nenek moyang kita sudah mengenal arti pentingnya akan toleransi.
- Adanya hubungan kerjasama kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan luar negeri

c. Pada sila Persatuan Indonesia

Adanya upaya Mahapatih Gajahmada untuk menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa.

d. Pada sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sejak dulu nenek moyang kita sudah mengenal adanya budaya rembug, serta ditemukannya balai desa, balai nagari, dan lain sebagainya.

e. Pada sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ditemukannya waduk atau irigasi untuk membantu sistem pertanian.

3. Latar Belakang Yuridis

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
- b. Pasal 31 UUD 1945
- c. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. UU Nomo2 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. PP No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

E. LATIHAN

Coba saudara jelaskan implementasi pendidikan Pancasila dalam kegiatan-kegiatan di kampus, baik itu yang bersifat akademik maupun non akademik.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, Hamid. 2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.

PERTEMUAN KE : 2

POKOK BAHASAN : PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA.

A. PENDAHULUAN

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai sejarahnya. Sejarah merupakan cerminan kita untuk menapaki masa kini dan masa yang akan datang. Maka dari itu dalam kaitannya dengan pendidikan Pancasila kita dituntut untuk mengetahui tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tonggak sejarah merupakan peristiwa yang bermakna bagi bergerak majunya umat manusia atau masyarakat suatu bangsa dalam perkembangan atau pembangunan yang ditempuhnya. Tonggak-tonggak sejarah dimaksud di sini adalah suatu peristiwa atau momentum penting yang memiliki makna bagi perkembangan adat dan budaya umat manusia atau suatu bangsa, karena peristiwa tersebut mampu merubah pola pikir, pola sikap dan tindak manusia atau bangsa yang bersangkutan menuju kemajuan umat manusia atau bangsa.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pancasila dari perspektif sejarah perjuangan bangsa.
2. Mahasiswa dapat memetik pelajaran dari tiap-tiap babak sejarah perjuangan bangsa.

C. MATERI

Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan Nasional:

1. Masa Kerajaan Sriwijaya
2. Masa Kerajaan Majapahit
3. Perjuangan Bangsa Indonesia melawan penjajahan
4. Perjuangan dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan

D. RANGKUMAN

Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan Nasional

1. Masa Kerajaan Sriwijaya
 - a. Nilai sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu hidup berdampingan secara damai, Sriwijaya menjadi pusat pengembangan agama Budha di Asia Tenggara.
 - b. Nilai sila kedua ditandai dengan terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India dalam pengiriman pemuda untuk belajar di India.
 - c. Nilai sila ketiga, Sriwijaya telah menerapkan konsep wawasan nusantara.
 - d. Nilai sila keempat, Sriwijaya memiliki kedaulatan yang sangat luas.
 - e. Nilai sila kelima ditandai dengan kehidupan rakyat Sriwijaya yang sangat adil dan makmur karena pengaruh pusat pelayaran dan perdagangan.
2. Masa Kerajaan Majapahit
 - a. Adanya keberadaan umat Hindu dan Budha yang saling berdampingan
 - b. Terdapat istilah Pancasila dalam kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca, serta seloka persatuan “Bhineka Tunggal Ika” pada kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular.

- c. Hubungan persahabatan Raja Hayam Wuruk dengan Cina, Champa, Kamboja, dan lain-lain sebagai perwujudan sila kedua.
 - d. Perwujudan sila persatuan melalui sumpah Palapa oleh Mahapatih Gajahmada.
 - e. Sistem Pemerintahan Majapahit menekankan pada musyawarah mufakat.
3. Perjuangan Bangsa Indonesia melawan penjajahan
- a. Perjuangan sebelum abad XX ditandai dengan perlawanan-perlawanan rakyat sebagai bentuk daripada cinta tanah air.
 - b. Kebangkitan nasional tahun 1908
 - c. Sumpah Pemuda 1928
 - d. Perjuangan pada masa pendudukan Jepang (1942-1945).
4. Perjuangan dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
- Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Puncak perjuangan bangsa Indonesia, serta beberapa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, baik itu perjuangan berupa fisik maupun diplomasi yang puncaknya pada pengakuan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949.

E. LATIHAN

Coba saudara petik nilai-nilai yang bisa diambil dari tiap babak sejarah tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, Hamid.2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.

PERTEMUAN KE : 3

POKOK BAHASAN : HAKIKAT DAN NILAI DASAR PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Hal ini telah diusahakan yaitu dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata baik dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa adanya transformasi nilai-nilai tersebut dalam keadaan nyata, maka Pancasila hanya tinggal nama tanpa makna. Pancasila hanya sebagai hiasan dalam Pembukaan UUD 1945.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. MATERI

Hakekat dan Nilai pada sila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

D. RANGKUMAN

Nilai-nilai sila pada Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Bersikap hormat menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
 - c. Bersikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan orang lain.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b. Saling mencintai sesama manusia.
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 - d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

3. Persatuan Indonesia
 - a. Menjaga persatuan dan kesatuan
 - b. Rela berkorban demi bangsa dan negara
 - c. Cinta tanah air
 - d. Menjunjung tinggi semangat bhineka tunggal ika
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
 - a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
 - b. Tidak memaksakan kehendak orang lain
 - c. Mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - a. Bersikap adil terhadap sesama
 - b. Menghormati hak-hak orang lain
 - c. Menolong sesama
 - d. Menghargai orang lain
 - e. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

E. LATIHAN

Jelaskan makna dan nilai Pancasila secara hierarkis piramidal

F. DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, Hamid. 2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PARADIGMA.
- Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.

PERTEMUAN KE : 4

POKOK BAHASAN : PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos yang berarti bentuk atau idein yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau faham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu. Maka ideologi adalah ilmu pengeahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ideologi-ideologi besar di dunia
2. Mahasiswa dapat membandingkan antara ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi besar di dunia.
3. Mahasiswa mampu memperkuat ideologi Pancasila.

C. MATERI

Ideologi – ideologi besar di dunia;

1. Ideologi yang menempatkan pada suatu agama
2. Leberalis
3. Sosialis
4. Komunis
5. Fasis

D. RANGKUMAN

Ideologi – ideologi besar di dunia;

1. Ideologi yang menempatkan pada suatu agama
Penempatan agama sebagai ideologi pernah mengalami masa kejayaan pada abad pertengahan di Eropa, yang kemudian berimplikasi antara lain:
 - a. Ajaran agama tidak boleh dibantah oleh akal manusia
 - b. Orientasi kehidupan masyarakat Eropa hanya ditujukan pada kehidupan setelah mati
 - c. Kemajuan duniawi tidak ada artinya manakala seseorang tidak bisa masuk surga.
2. Leberalis
 - a. Paham yang memberikan kebebasan pada manusia
 - b. Menurut pandangan ini, manusia pada dasarnya adalah baik
 - c. Tugas negara mengurangi hambatan manusia dalam mencaapai kesempurnaan (negara penjaga malam)
3. Sosialis
 - a. Paham yang berupaya agar semua harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara.
 - b. Sistem ekonomi centris dengan prinsip pemerataan
4. Komunis
 - a. Mengehendaki penguasaan sarana-sarana vital oleh negara

- b. Perubahan terhadap kapitalisme harus dicapai dengan revolusi, bahkan kekerasan dan diperlukan kepemimpinan diktator, seluruh hak pribadi dihapuskan dan diambil alih oleh negara

5. Fasis

- a. Mendasarkan pada prinsip kepemimpinan secara otoritas absolut dimana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian.
- b. Fasis menolak adanya oposisi
- c. Menolak segala bentuk kebhinekaan
- d. Kekuasaan bertumpu pada militer

6. LATIHAN

Jelaskan perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi berdasar agama, liberalis, sosialis, komunis, fasis.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PARADIGMA.
- Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.
- Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.

PERTEMUAN KE : 5

POKOK BAHASAN : HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DAN UUD 1945

A. PENDAHULUAN

Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, keduanya memiliki kaitan erat dan hubungan yang saling mengikat. Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara Republik Indonesia dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian, bangsa perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga/masyarakat, warga negara dan penduduk Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan sistematika hubungan Pancasila dan UUD 1945.

C. MATERI

1. Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara Formal
2. Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara Material

D. RANGKUMAN

1. Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara Formal
 - a. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV
 - b. Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu:
 - 1) Pembukaan UUD 1945 itu memberikan faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
 - 2) Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum dan tertib hukum tertinggi.
2. Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara Material

Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat. Dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut adalah Pancasila.

E. LATIHAN

Jelaskan implementasi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

F. DAFTAR PUSTAKA

Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PARADIGMA.

Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.

Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.

PERTEMUAN KE : 6

POKOK BAHASAN : PEMBUKAAN UUD 1945

A. PENDAHULUAN

UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum, maka UUD 1945 adalah mengikat, mengikat pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat, juga mengikat setiap warganegara Indonesia di mana saja dan setiap penduduk yang ada di wilayah negara Indonesia. Sebagai hukum UUD 1945 berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.

Apabila UUD itu merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami makna-makna dari tiap alinea Pembukaan UUD 1945.

C. MATERI

Makna Alinea Pembukaan UUD 1945:

1. Alinea pertama
2. Alinea kedua
3. Alinea ketiga
4. Alinea keempat

D. RANGKUMAN

1. Alinea pertama
 - a. Bangsa Indonesia bukan hanya saja bertekad untuk merdeka, tetapi juga akan tetap berdiri di barisan paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.
 - b. Merupakan aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan.
2. Alinea kedua
 - a. Bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan.
 - b. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
 - c. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
3. Alinea ketiga

Keseimbangan kehidupan materiil dan spiritual
4. Alinea keempat
 - a. Fungsi dan tujuan negara Indonesia
 - b. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
 - c. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila

PERTEMUAN KE : 7

POKOK BAHASAN : DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

A. PENDAHULUAN

UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945.

C. MATERI

Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 pada masa;

1. Awal Kemerdekaan
2. Orde Lama
3. Orde Baru
4. Pasca Reformasi

D. RANGKUMAN

Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 pada masa:

1. Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
 - a. UUD 1945 belum berjalan sebagaimana mestinya, mengingat kondisi lembaga negara masih belum tertata dengan rapi.
 - b. Kondisi dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang ditandai dengan perjuangan fisik maupun diplomasi.
2. Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)

Pada masa ini dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan adanya penyimpangan-penyimpangan, antara lain:

 - a. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi menteri negara.
 - b. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
 - c. Presiden mengeluarkan produk hukum yang setingkat Undang-Undang tanpa persetujuan DPR.
 - d. Ikut campur Presiden dalam sistem pemerintahan yang cenderung otoriter.
 - e. Besarnya pengaruh PKI dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari ideologi yang berintikan NASAKOM.
3. Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Orde Baru memiliki visi menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sehingga dikeluarkanlah ketetapan MPRS antara lain:

 - a. TAP No. XII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera.
 - b. TAP No. XVII/MPRS/1966 tentang permohonan maaf dan penarikan kembali pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup.

- c. TAP No.XXI/MPRS/1966 tentang penyederhanaan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan.
 - d. TAP No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI
- 4. Pasca Reformasi 1998**
- a. Amandemen UUD 1945
 - b. Supremasi hukum, HAM, demokrasi
 - c. Dihapuskannya Dwifungsi ABRI
 - d. Penghapusan KKN
 - e. Otonomi daerah yang seluas-luasnya

PERTEMUAN KE : 8

POKOK BAHASAN : REFORMASI

A. PENDAHULUAN

Reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam politik, sosial, ekonomi dan hukum. Masalah yang sangat mendesak adalah upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Pada waktu itu, harga sembako rakyat sempat membumbung tinggi, bahkan warga masyarakat harus antri untuk membeli.

Sementara itu, melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin krisis dan menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru tidak terkendali menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu muncul gerakan Reformasi yang bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu mengupas tentang:

1. Reformasi Nasional
2. Dampak Reformasi bagi kehidupan masyarakat
3. Kondisi bangsa Indonesia pasca Reformasi

C. MATERI

1. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
2. Kondisi bangsa Indonesia pasca Reformasi Nasional

D. RANGKUMAN

1. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
 - a. Munculnya Krisis Politik
 - 1) Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif.
 - 2) Merajalelanya KKN dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
 - 3) Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI memasung kebebasan setiap warganegara sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
 - b. Munculnya Krisis Hukum

Kekuasaan peradilan dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa.
 - c. Munculnya Krisis Ekonomi

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat
 - d. Munculnya Krisis Sosial Budaya

Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama.

2. Kondisi bangsa Indonesia pasca Reformasi Nasional

a. Bidang Politik

Kelebihan:

- 1) Adanya kebebasan berpendapat
- 2) Berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah.
- 3) Perbaikan HAM
- 4) Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik
- 5) Semakin diterapkannya otonomi Daerah

Kelemahan:

- 1) Maraknya kerusuhan akibat demonstrasi.
- 2) Merajalelanya KKN sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah
- 3) Penyalahgunaan kebebasan pers

b. Bidang sosial

- 1) Munculnya konflik antar etnis maupun gerakan-gerakan sparatis
- 2) Lepasnya Timor Timur

c. Bidang ekonomi

- 1) Hutang negara mulai menumpuk
- 2) Kas negara mulai kosong
- 3) Banyak para investor yang menarik diri karena faktor keamanan

E. LATIHAN

Berikan analisis tentang imlementasi pelaksanaan reformasi di segala bidang

F. DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Hamid.2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.

Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.

PERTEMUAN KE : 9

POKOK BAHASAN : SISTEM PEMERINTAHAN RI

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 yang telah diamandemen sangat berbeda dengan sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum diamandemen. Secara garis besar gambaran tentang sistem pemerintahan negara yang dianut oleh UUD 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
2. Sistem konstitusional
3. Negara Indonesia adalah negara hukum
4. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahaasiswa mengetahui perbedaan antara sistem pemerintahan negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, serta menjelaskan fungsi-fungsi lembaga tinggi negara.

C. MATERI

Lembaga-lembaga tinggi negara

D. RANGKUMAN

Lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR)
Kewenangan MPR:
 - a. Mengubah dan menetapkan UUD
 - b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
 - c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
2. Presiden dan Wapres
Kewenangan sebagai Kepala Negara:
 - a. Menguasai AD, AL, AU, dan Kepolisian
 - b. Menyatakan Perang
 - c. Menyatakan keadaan dalam keadaan bahaya
 - d. Mengangkat duta dan konsul
 - e. Mengadakan kerjasama dengan negara lainKewenangan sebagai Kepala Pemerintahan:
Memebentuk kabinet, serta mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Hak:
 - a. Hak amandemen
 - b. Hak budgeting
 - c. Hak interpelasi, dll

Kewajiban:

- a. Memelihara Pancasila dan UUD 1945
 - b. Menyalurkan aspirasi rakyat
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahasnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat – daerah, pembetukaan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE serta berkaitan yang berkitan dengaan perimbangan keuangan pusat-daerah.
5. Badan Pengawas Keuangan (BPK)
- Memeriksa keuangan negara
6. Mahkamah Agung (MA)
- Merupaakan Lembaga Kehakiman tertinggi
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
- a. Mengadli pada tingat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
 - c. Memutus pembubaran parpol dan perselisihan hasil pemilu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Hamid.2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.

Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.

PERTEMUAN KE : 10

POKOK BAHASAN : PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK

A. PENDAHULUAN

Etika adalah ilmu yang mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia. Etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia disebut etika umum. Etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup lingkungan khusus disebut etika khusus. Dalam etika khusus terdapat etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu etika yang mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai makhluk individual terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial adalah etika yang mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai umat manusia. Dalam etika sosial terdapat sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika pendidikan, etika lingkungan hidup, etika politik, dan kritik ideologi.

Pancasila dikaitkan dengan sistem etika maka akan memberi jawaban mengenai konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sebab di dalamnya terkandung prinsip terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia karena sila-sila Pancasila merupakan etika dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pancasila dalam sistem etika.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. MATERI

1. Nilai-nilai Etika dalam Pancasila
2. Etika dalam kehidupan kenegaraan dan Hukum
3. Etika kehidupan berbangsa

D. RANGKUMAN

1. Nilai-nilai Etika dalam Pancasila
Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini.
 - a. Tatanan bermasyarakat
 - b. Tatanan bernegara
 - c. Tatanan kerjasama antar negara
 - d. Tatanan pemerintah daerah
 - e. Tatanan hidup beragama
 - f. Tatanan bela negara
 - g. Tatanan pendidikan
 - h. Tatanan berserikat
 - i. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan
 - j. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang-seorang

2. Etika dalam kehidupan kenegaraan dan Hukum

Konstitusi adalah suatu pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, yang seringkali diperluas dalam organisasi apapun. Sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara maka konstitusi pada umumnya memuat:

- a. Hal-hal yang dianggap fundamental dalam berorganisasi, seperti kepala negara, warganegara, perwakilan, kewenangan kenegaraan.
- b. Hal-hal yang dianggap penting dalam hidup berkelompok oleh suatu bangsa, sekalipun oleh bangsa lain tidak dianggap demikian, misalnya soal pekerjaan yang layak, soal pendidikan dan sebagainya.
- c. Hal-hal yang dicita-citakan, sekalipun hal itu seolah-olah sulit untuk dicapai karena idealistik.

3. Etika kehidupan berbangsa

Etika kehidupan berbangsa meliputi antara lain:

- a. Etika sosial dan budaya
- b. Etika politik dan pemerintahan
- c. Etika ekonomi dan bisnis
- d. Etika penegakan hukum yang berkeadilan
- e. Etika keilmuan

E. LATIHAN

Buat Presentasi Kelompok dan Diskusi Panel

F. DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Hamid. 2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.

Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.

PERTEMUAN KE : 11

POKOK BAHASAN : DEMOKRASI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, Kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warganegara saling memberi peluang yang sama.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

C. MATERI

Perkembangan Demokrasi di Indonesia, pada masa:

1. Demokrasi Liberal (1945 – 1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
3. Demokrasi Pancasila (1966 – 1998)
4. Pasca Reformasi 1998

D. RANGKUMAN

1. Demokrasi Liberal (1945 – 1959)
 - a. Sistem Parlementer
 - b. Kondisi politik tidak stabil
 - c. Kabinet umumnya tidak bertahan lama
2. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
 - a. Kekuasaan lebih bertumpu pada presiden
 - b. Terbatasnya peranan partai politik
 - c. Berkembangnya pengaruh komunis
3. Demokrasi Pancasila (1966 – 1998)
 - a. Dominasi militer
 - b. Adanya penyederhanaan kepartaian
 - c. Adanya azas monoloyalitas pada PNS dan birokrat untuk memilih GOLKAR
4. Pasca Reformasi 1998
 - a. Adanya otonomi daerah seluas-luasnya
 - b. Keran demokrasi mulai dibuka lebar
 - c. Supremasi hukum dan politik

E. LATIHAN

Buat Presentasi Kelompok dan Diskusi Panel

F. DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PERTEMUAN KE : 12

POKOK BAHASAN : HAM Menurut UUD 1945

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME. Sejarah asal mula hak-hak asasi manusia berawal dari Eropa Barat yaitu Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi manusia adalah piagam Magna Charta pada 1215. Perkembangan berikutnya adalah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Perancis 1789. Pada tahun 1789 munculnya Revolusi Perancis bertujuan untuk membebaskan warga negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang penguasa tunggal negara di Perancis yang kala itu dipimpin oleh Raja Louis XVI. HAM juga bersifat supra-legal, artinya tidak tergantung pada adanya suatu negara atau UUD, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi, karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu Tuhan YME.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai HAM menurut UUD 1945 serta bentuk pelanggaran.

C. MATERI

Hak-hak Asasi di dalam UUD 1945

D. RANGKUMAN

Berkenaan dengan hak asasi ini PBB telah mengeluarkan Universal Declaration Of Human Rights pada 10 Desember 1948. Dan dasar dari deklarasi itu adalah individualisme dengan segala hak-hak yang dipunyainya. Hak itu secara terperinci diuraikan di dalam deklarasi tersebut dan di Indonesia secara konstitusional dicantumkan pokok-pokoknya dengan latar belakang semangat kekeluargaan. Kita ketahui dalam alinea pertama dari Pembukaan UUD 1945 dinyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Dalam ayat 2 pasal tersebut menetapkan bahwa berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pasal 28 UUD 1945 diatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan sila V Pancasila diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
2. Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

E. LATIHAN

Buat presentasi kelompok dan diskusi panel

F. DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Darmadi, Hamid. 2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.

PERTEMUAN KE : 13

POKOK BAHASAN : PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah ***“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”***. Tujuan pertama merupakan manifestasi dari negara hukum formal. Sedangkan tujuan kedua dan ketiga merupakan manifestasi dari pengertian negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus. Sementara tujuan yang terakhir merupakan perwujudan dari kesadaran suatu bangsa yang hidup di tengah-tengah pergaulan masyarakat internasional. Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional.

C. MATERI

1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik dan hukum.
2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi
3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan HANKAM
4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya

D. RANGKUMAN

1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik dan hukum.
Keberhasilan pembangunan politik bukan hanya dilihat atau diukur dari terlaksananya pemilu dan terbentuknya lembaga-lembaga demokratis seperti MPR, Presiden, DPR, dan DPRD, melainkan harus diukur dari kemampuan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik.
2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi
Sesuai dengan paradigma Pancasila dan hak-hak asasi rakyat, para pendiri negara telah menetapkan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia diserahkan kepada tiga bentuk badan usaha, yaitu:
 - a. Koperasi sebagai soko guru Indonesia
 - b. BUMN/BUMD
 - c. Badan Usaha Swasta
3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan HANKAM
TNI berperan tidak hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk sosial ekonomi.

4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia, baik buruknya perencanaan, proses, dan hasil pembangunan bidang sosial budaya harus diukur dengan Pancasila.

E. LATIHAN

Buat presentasi kelompok dan diskusi panel

F. DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Hamid. 2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.

Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.

PERTEMUAN KE : 14

POKOK BAHASAN : AKTUALISASI PANCASILA DI LINGKUNGAN KAMPUS

A. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
2. Mengembangkan IPTEK dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai wujud aktualisasi Pancasila di lingkungan kampus.

C. MATERI

1. Kebebasan Mimbar Akademik
2. Otonomi Keilmuan
3. Peran Mahasiswa di Lingkungan Masyarakat

D. RANGKUMAN

1. Kebebasan Mimbar Akademik

Mahasiswa pada dasarnya adalah manusia yang berada dalam suatu proses perjalanan menuju bentuk “menjadi ilmuwan”, sehingga mahasiswa dikatakan sebagai setengah ilmuwan. Oleh karena itu mahasiswa belum memiliki kewibawaan penuh pemegang otoritas dalam kegiatan ilmu. Mahasiswa harus dibimbing oleh dosen yang menunjukkan tujuan yang hendak dicapai.

2. Otonomi Keilmuan

Ilmu Pengetahuan memang dapat memperoleh otonomi dalam melakukan kegiatannya untuk mempelajari alam semesta, tetapi masalah moral akan timbul manakala berkaitan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah itu. Sisi kajian internal digunakan manakala ilmu hanya menggunakan metode spesifik yang dimiliki untuk dipraktekkan ilmuwan secara otonomi. Sedang pada sisi kajian eksternalistik, ilmu akan berkaitan dengan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

3. Peran Mahasiswa di Lingkungan Masyarakat

Peran mahasiswa di lingkungan masyarakat antara lain:

- a. Mahasiswa sebagai *agen of change*
- b. Mahasiswa perlu belajar untuk dapat mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian, laporan hasil kajian ilmiah, dan diskusi kepada masyarakat.

E. LATIHAN

Buat presentasi kelompok dan diskusi panel.

F. DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Hamid. 2016. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.

Soegito, AT. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.